

Dari Kebijakan ke Praktik: Analisis Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya

From Policy to Practice: An Analysis of the Implementation of Gender Mainstreaming in the City of Surabaya

Shafira izzani Maulania¹, Shafina Tri Ameylia², Indah Prabawati³, Firre Ann Suprpto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 10 May 2026

Available online 18 May 2026

Keywords: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, Kota Surabaya.
Keywords: public policy, policy implementation, gender mainstreaming, gender equality, Surabaya City.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender, yang dibuktikan melalui tingginya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta berbagai penghargaan di bidang kesetaraan gender yang telah diraih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik melalui berbagai

program pembangunan yang responsif gender. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman mengenai kesetaraan gender, serta koordinasi birokrasi yang belum maksimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

ABSTRACT

Gender Mainstreaming (PUG) is a development strategy aimed at achieving gender equality and justice in various aspects of social life through the integration of gender perspectives into the planning, implementation, and evaluation of development programs. Surabaya City is considered one of the regions that has successfully implemented gender mainstreaming policies, as reflected in its high Gender Empowerment Index (GEI) and various awards related to gender equality. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type to examine the achievements of the Surabaya City Government in implementing gender mainstreaming. The data used in this study are secondary data obtained through literature studies and documentation from various sources, such as scientific journals, policy documents, government reports, and official publications related to gender mainstreaming. The collected data were then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the implementation of gender mainstreaming in Surabaya City has been carried out quite well through various gender-responsive development programs. However, the implementation still faces several obstacles, such as ineffective policy communication, limited human resources, low public understanding of gender equality, and less optimal bureaucratic coordination. Based on the analysis using George Edward III's policy implementation theory, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are the main factors influencing the success of gender mainstreaming policy implementation in Surabaya City.

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan maupun isu yang berkaitan tentang gender sudah banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir dan mulai menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan. Salah satu contoh topik yang sering dibicarakan adalah mengenai diskriminasi gender, hal ini menjadi menarik karena bahkan masih banyak orang yang tidak menyadari telah terlibat dalam suatu diskriminasi terhadap salah satu gender. Biasanya orang-orang masih belum memahami dengan baik konsep diskriminasi dan mewajarkannya karena hal itu telah menjadi suatu budaya.

Diskriminasi gender biasanya terjadi di bidang industri, di mana banyak orang yang menganggap bahwa banyak pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dinilai tidak bisa menggantikan laki-laki dalam pekerjaannya. Tak hanya itu, perempuan juga telah mendapat pandangan sebagai penanggung jawab 'urusan domestik' seperti pekerjaan rumah. Dalam hal ini juga laki-laki yang memilih untuk ikut serta dalam urusan rumah tangga juga mendapat diskriminasi karena dianggap tidak mau bekerja menafkahi keluarga. Hal semacam ini akan membatasi setiap gender untuk melakukan segala sesuatu yang mereka minati.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan yang menuangkan 26 program responsif gender secara meluas ke berbagai bidang, paradigma pembangunan Indonesia bergeser ke arah pembangunan yang meletakkan kesetaraan gender pada intinya. Namun, pergeseran paradigma ini tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan terkait gender di masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat maupun pengambil keputusan yang mendefinisikan PUG sebagai kebijakan yang condong ke perempuan semata.

Pengarusutamaan Gender atau PUG sendiri adalah sebuah kebijakan yang mengatur strategi pembangunan yang memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan yang adil antara laki-laki dan perempuan

(Gorvu.Tangerangkota, 2025). Pengarusutamaan Gender (PUG) secara nasional dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dan pelaksanaannya sendiri diamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sampai saat ini, pemerintah masih mengupayakan tercapainya kesetaraan gender dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia. Tercapainya kesetaraan gender punya tujuan untuk menormalisasi perbedaan kebutuhan dan prioritas antara perempuan dan laki-laki, juga meminimalisir kesenjangan antar gender dalam berbagai bidang.

Salah satu indikator penting untuk melihat kesetaraan gender adalah IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks indikator ini terus meningkat secara nasional dan telah mengalami peningkatan signifikan dalam sembilan tahun, dari nilai 68,15 pada tahun 2010 dan mencapai 75,24 di tahun 2019. Dalam rentang waktu itu pertumbuhan pada tahun 2019 bisa dikatakan sangat pesat karena mencapai penambahan 3,14 poin atau setara dengan 4,35 persen, terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 0,36 poin atau 0,50 persen. (KemenPPA, 2020).

Dalam tingkat lokal, salah satu kota yang sudah bagus dalam kacamata IDG adalah Kota Surabaya, dalam IDG, Kota Surabaya termasuk ke dalam salah satu kota dengan IDG tertinggi di Indonesia dengan angka yang menyentuh 83,88 pada tahun 2019. Komitmen Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil membawa kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur ini menyandang penghargaan 'Anugerah Parahita Ekapraya' sebanyak enam kali berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2013 (Munir, 2018). Lalu 3 tahun kemudian Surabaya kembali meraih penghargaan yang sama dengan kategori tertinggi, yaitu Mentor. Penghargaan ini merupakan buah dedikasi Surabaya dari upaya yang dilakukan dengan penancangan Kota Surabaya sebagai Kota Peduli Perempuan (Riski, 2012).

Surabaya telah memahami bagaimana tata kelola perkotaan dapat membentuk dinamika kesetaraan gender. Kota ini sudah lama mengenalkan berbagai program responsif gender dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun demikian, kesenjangan gender belum semata-mata menghilang dari kota ini. Indikator statistik

menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada, terutama dalam pendapatan dan partisipasi kerja. Walaupun perempuan sendiri sudah menunjukkan pencapaian yang bagus dalam harapan hidup dan pencapaian pendidikan. Menganalisis mengenai kesenjangan dan diskriminasi gender ini dirasa penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah diimplementasikan dalam Kota Surabaya. Juga untuk melihat keberhasilan yang telah diraih Kota Surabaya dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender atau PUG.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana Kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender, seberapa bermanfaat keberhasilan itu untuk masyarakatnya, juga untuk mempelajari hal-hal yang belum maksimal sehingga kesenjangan dan diskriminasi gender belum sepenuhnya hilang dari Kota Surabaya meskipun Surabaya telah dinilai cukup berhasil menjalankan kesetaraan gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik biasanya dirumuskan melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan, kesejahteraan, serta keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam prosesnya, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga harus diimplementasikan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting karena pada tahap inilah kebijakan mulai diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan yang telah dirancang tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan secara jelas kepada pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga kerja, anggaran, serta fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, prosedur kerja, serta pembagian tugas yang ada dalam lembaga pemerintah. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami berbagai hambatan.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Konsep pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, serta manfaat yang sama dalam berbagai program pembangunan. Pengarusutamaan gender dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Melalui strategi ini, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penerapan pengarusutamaan gender melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Di Indonesia,

penerapan pengarusutamaan gender telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan secara konsisten agar tujuan kesetaraan gender dapat tercapai secara optimal. Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam pengarusutamaan gender (PUG). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kebijakan secara lebih mendalam melalui analisis berbagai informasi yang tersedia. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG di tingkat daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi implementasi kebijakan yang sedang diteliti. Penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan secara normatif, tetapi juga berupaya memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Analisis dilakukan dengan meninjau berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengarusutamaan gender. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder** yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode **studi dokumentasi**, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan **analisis deskriptif kualitatif**, dengan cara mengorganisasi, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi kunci untuk memahami sejauh mana kebijakan PUG yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam praktik di masyarakat.

Komunikasi Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, komunikasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Edward III menekankan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada para pelaksana maupun kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan terjadinya kesalahan pemahaman, perbedaan interpretasi, hingga lemahnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya, komunikasi kebijakan menjadi salah satu aspek penting karena kebijakan ini tidak hanya menyangkut pemerintah sebagai pelaksana utama, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Pengarusutamaan gender memerlukan pemahaman yang sama mengenai konsep kesetaraan gender, peran laki-laki dan

perempuan dalam pembangunan, serta pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil studi literatur, implementasi PUG di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan yang belum merata menyebabkan masih adanya aparat pemerintah maupun masyarakat yang belum memahami tujuan dan mekanisme PUG secara menyeluruh. Akibatnya, implementasi kebijakan seringkali hanya bersifat formalitas administratif tanpa diikuti perubahan substantif dalam praktik pembangunan.

Penelitian Wongkar, Liando, dan Kawung menjelaskan bahwa salah satu hambatan implementasi pengarusutamaan gender terletak pada lemahnya komunikasi antar pelaksana kebijakan. Mereka menyatakan bahwa "kebijakan pengarusutamaan gender belum optimal diimplementasikan karena faktor komunikasi yang tidak mendukung". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan masih belum berjalan efektif sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi di Kota Surabaya, komunikasi kebijakan PUG dapat dilihat dari proses sosialisasi program, koordinasi antar perangkat daerah, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya melalui pelatihan, seminar, maupun integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan pembangunan. Namun, berdasarkan berbagai kajian, pemahaman mengenai gender masih sering dipersepsikan sebatas isu perempuan, padahal PUG memiliki cakupan yang lebih luas terkait keadilan dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Selain itu, komunikasi kebijakan juga berkaitan dengan konsistensi informasi yang diberikan kepada pelaksana. Ketidakkonsistenan instruksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menyebabkan implementasi program menjadi tidak sinkron. Dalam beberapa kasus, perangkat daerah memiliki tingkat pemahaman yang berbeda mengenai indikator keberhasilan PUG sehingga pelaksanaan program antarinstansi menjadi tidak seragam.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan gender sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi organisasi. Ulya menyebutkan bahwa koordinasi dan penyampaian informasi yang baik antar pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kesetaraan gender. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaan PUG.

Di tingkat masyarakat, tantangan komunikasi juga muncul karena masih adanya budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang terhadap isu gender. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa program gender hanya berfokus pada perempuan, sehingga partisipasi laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sosial.

Selain faktor masyarakat, media komunikasi yang digunakan pemerintah juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sosialisasi yang hanya dilakukan melalui forum formal seringkali kurang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif, misalnya melalui media digital, edukasi komunitas, maupun kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar informasi mengenai PUG dapat dipahami secara lebih luas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi kebijakan menjadi pondasi penting dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Kejelasan informasi, konsistensi pesan, koordinasi antar lembaga, serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PUG. Jika komunikasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, maka pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap pengarusutamaan gender akan semakin meningkat sehingga tujuan pembangunan yang adil dan setara gender dapat tercapai.

Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun fasilitas pendukung lainnya. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang cukup maka tujuan kebijakan akan sulit diwujudkan secara optimal.

Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya, aspek sumber daya menjadi faktor yang sangat penting karena kebijakan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, kompetensi aparatur, dukungan anggaran, serta sarana pendukung untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam pembangunan daerah. Pengarusutamaan gender tidak hanya sekedar kebijakan administratif, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas institusi, dan komitmen jangka panjang dari seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil studi literatur, salah satu tantangan utama implementasi PUG di berbagai daerah di Indonesia adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Banyak aparatur pemerintah yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep gender, analisis gender, maupun penyusunan program responsif gender. Akibatnya, implementasi PUG sering kali hanya dipahami sebagai program yang berkaitan dengan perempuan semata, bukan sebagai strategi pembangunan yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian Ulya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai gender agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana kebijakan dalam memahami tujuan dan mekanisme pengarusutamaan gender.

Dalam konteks Kota Surabaya, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, dan sosialisasi terkait perencanaan serta penganggaran responsif gender. Namun demikian, berdasarkan berbagai kajian, masih terdapat kesenjangan kemampuan antar perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program pembangunan. Beberapa instansi telah mampu menyusun program responsif gender dengan baik, sementara instansi lainnya masih mengalami kesulitan dalam menerapkan analisis gender pada tahap perencanaan dan evaluasi program.

Selain kualitas sumber daya manusia, aspek anggaran juga menjadi elemen penting dalam implementasi PUG. Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan dana yang memadai agar program-program terkait kesetaraan gender dapat berjalan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, berbagai program pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, maupun pelatihan gender tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Menurut Fauziyah, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender memerlukan dukungan anggaran yang terintegrasi dalam proses pembangunan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran responsif gender merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan.

Di Kota Surabaya, penganggaran responsif gender telah mulai diterapkan dalam beberapa program pembangunan daerah. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait prioritas anggaran dan pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme penyusunan anggaran berbasis gender. Dalam beberapa kasus, program gender masih dianggap sebagai program tambahan sehingga alokasi dananya belum menjadi prioritas utama dibandingkan sektor pembangunan lainnya.

Selain sumber daya manusia dan finansial, implementasi PUG juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas pendukung seperti pusat layanan perempuan dan anak, akses informasi publik yang inklusif, serta sistem data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan gender. Ketersediaan data gender yang akurat sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi ketimpangan gender di masyarakat sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan data gender. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan program seringkali belum berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Nurdin menjelaskan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan institusional, termasuk keterbatasan sistem pendukung dan data yang terintegrasi.

Dalam konteks Surabaya, meskipun pemerintah daerah telah memiliki berbagai inovasi pelayanan publik dan sistem informasi pembangunan, penguatan data terpilah gender tetap menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi PUG. Data yang lengkap dan akurat dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun ketenagakerjaan sehingga program yang disusun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspek sumber daya juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan. Partisipasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan organisasi perempuan dapat menjadi sumber daya sosial yang memperkuat implementasi PUG. Kolaborasi antar pihak memungkinkan proses edukasi dan pengawasan kebijakan berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori George Edward III, sumber daya menjadi faktor fundamental dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan anggaran, fasilitas pendukung, sistem data, serta partisipasi masyarakat. Jika seluruh aspek sumber daya tersebut dapat diperkuat secara berkelanjutan, maka implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya akan mampu berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap terciptanya pembangunan yang adil dan setara gender.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Disposisi merujuk pada komitmen, pemahaman, kesediaan, dan sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, meskipun komunikasi berjalan baik dan sumber daya tersedia, implementasi kebijakan tetap tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang mendukung terhadap tujuan kebijakan tersebut.

Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya, disposisi pelaksana menjadi aspek yang sangat penting karena kebijakan ini berkaitan erat dengan perubahan cara pandang, pola pikir, dan budaya kerja dalam birokrasi maupun masyarakat. Pengarusutamaan gender tidak hanya membutuhkan kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan komitmen dari para pelaksana untuk benar-benar menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan.

Berdasarkan hasil studi literatur, salah satu hambatan utama implementasi PUG di Indonesia adalah masih rendahnya pemahaman dan komitmen sebagai pelaksana kebijakan terhadap isu gender. Dalam beberapa kasus, aparat pemerintah masih memandang isu gender sebagai persoalan sekunder yang hanya berkaitan dengan perempuan, sehingga implementasinya belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Penelitian Wongkar, Liando, dan Kawung menunjukkan bahwa faktor disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu penyebab implementasi kebijakan pengarusutamaan gender belum berjalan optimal. Mereka menyatakan bahwa "faktor disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang tidak mendukung menjadi penyebab implementasi belum berjalan optimal". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana memiliki kesadaran dan kemauan untuk mendukung tujuan kebijakan.

Dalam konteks Kota Surabaya, disposisi pelaksana dapat dilihat dari bagaimana aparat pemerintah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan program, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya telah menunjukkan komitmen melalui berbagai regulasi dan program yang mendukung kesetaraan

gender. Namun, implementasi di tingkat pelaksana masih menghadapi tantangan karena tidak seluruh aparat memiliki tingkat pemahaman dan sensitivitas gender yang sama.

Sebagian pelaksana kebijakan masih memandang PUG hanya sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi indikator kinerja pemerintah daerah, bukan sebagai kebutuhan substantif dalam menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif. Akibatnya, beberapa program yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan pengalaman berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Selain itu, disposisi pelaksana juga berkaitan dengan tingkat kepedulian terhadap kelompok rentan. Dalam implementasi kebijakan gender, pelaksana kebijakan dituntut untuk memiliki perspektif yang inklusif terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan sosial. Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sensitivitas gender, maka kebijakan yang dijalankan cenderung bersifat formalitas dan kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penelitian Fauziyah menjelaskan bahwa implementasi pengarusutamaan gender membutuhkan komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan agar prinsip kesetaraan gender dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup kesediaan untuk mendukung perubahan sosial yang lebih adil gender.

Di Kota Surabaya, tantangan disposisi pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan konstruksi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi nilai patriarki. Budaya patriarki seringkali membentuk pandangan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih dominan dibanding perempuan, baik dalam keluarga maupun ruang publik. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara pandang pelaksana kebijakan terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan.

Akibatnya, implementasi kebijakan gender sering kali mengalami resistensi secara tidak langsung, misalnya melalui rendahnya perhatian terhadap program responsif gender atau kurangnya inisiatif dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan sektoral. Dalam beberapa kasus, isu gender bahkan masih dianggap sebagai isu tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi atau infrastruktur.

Namun demikian, terdapat pula perkembangan positif dalam implementasi PUG di Surabaya, terutama melalui meningkatnya kesadaran beberapa perangkat daerah terhadap pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender. Berbagai program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan menunjukkan adanya upaya membangun komitmen pelaksana kebijakan terhadap kesetaraan gender.

Disposisi pelaksana juga dapat diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai gender. Pelatihan tersebut penting untuk membangun pemahaman bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar program perempuan, tetapi strategi pembangunan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman pelaksana, maka implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain pelatihan, kepemimpinan juga menjadi faktor penting dalam membentuk disposisi pelaksana. Dukungan pimpinan daerah dan kepala instansi dapat mempengaruhi komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan gender. Ketika pimpinan menunjukkan keberpihakan terhadap kesetaraan gender, maka pelaksana di bawahnya cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa disposisi pelaksana memiliki pengaruh besar terhadap implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Komitmen, pemahaman, sensitivitas gender, dan kemauan pelaksana untuk mendukung kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran gender, serta dukungan kepemimpinan yang kuat perlu terus dilakukan agar implementasi pengarusutamaan gender dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi berkaitan dengan pola organisasi, mekanisme kerja, pembagian tugas, koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa birokrasi yang terlalu kompleks, tidak terkoordinasi, atau memiliki prosedur yang berbelit-belit dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya, struktur birokrasi memiliki peran yang sangat penting karena kebijakan ini bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai perangkat daerah. Pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu, tetapi harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan struktur birokrasi yang mampu mendukung koordinasi dan kerja sama antar lembaga secara efektif.

Berdasarkan hasil studi literatur, implementasi PUG di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, terutama terkait koordinasi antarinstansi dan integrasi kebijakan. Banyak daerah telah memiliki regulasi terkait pengarusutamaan gender, namun implementasinya belum berjalan optimal karena struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu.

Nurdin menjelaskan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan institusional yang berkaitan dengan lemahnya integrasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam konteks Kota Surabaya, pemerintah daerah pada dasarnya telah membentuk berbagai mekanisme kelembagaan untuk mendukung implementasi PUG, seperti pembentukan focal point gender, penyusunan regulasi daerah, serta integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberadaan lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan gender di tingkat daerah.

Namun demikian, berdasarkan berbagai kajian, koordinasi antar perangkat daerah dalam implementasi PUG masih menghadapi tantangan. Tidak semua instansi memiliki tingkat pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program kerja mereka. Akibatnya, implementasi kebijakan seringkali berjalan tidak seragam antar sektor pembangunan.

Sebagai kebijakan lintas sektor, pengarusutamaan gender membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai organisasi perangkat daerah, seperti dinas pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan daerah. Jika koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan mengalami fragmentasi dan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George Edward III menyebutkan bahwa fragmentasi birokrasi dapat menjadi hambatan implementasi karena pembagian tanggung jawab yang terlalu luas sering kali menyebabkan lemahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dalam implementasi PUG, fragmentasi ini dapat terlihat dari adanya perbedaan prioritas antarinstansi sehingga isu gender belum menjadi perhatian utama dalam seluruh sektor pembangunan.

Selain koordinasi, struktur birokrasi juga berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan. SOP diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana kebijakan agar implementasi berjalan secara konsisten dan terarah. Dalam implementasi pengarusutamaan gender, keberadaan SOP penting untuk memastikan bahwa perspektif gender benar-benar diintegrasikan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan.

Namun, dalam prakteknya masih ditemukan bahwa beberapa perangkat daerah belum memiliki pedoman teknis yang jelas terkait implementasi PUG. Kondisi ini menyebabkan

pelaksanaan kebijakan seringkali bergantung pada interpretasi masing-masing instansi sehingga hasil implementasi menjadi kurang maksimal.

Penelitian Girsang dkk. juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender membutuhkan koordinasi birokrasi yang kuat agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terintegrasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan gender.

Dalam konteks Surabaya, tantangan struktur birokrasi juga dapat dilihat dari mekanisme monitoring dan evaluasi program gender. Monitoring dan evaluasi yang belum berjalan optimal menyebabkan implementasi kebijakan sulit diukur secara menyeluruh. Padahal, evaluasi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan telah responsif gender dan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, birokrasi yang terlalu administratif juga dapat menjadi hambatan implementasi PUG. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan kebijakan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen administratif dibandingkan pada dampak nyata terhadap masyarakat. Akibatnya, pengarusutamaan gender terkadang hanya menjadi formalitas birokrasi tanpa diikuti perubahan substantif dalam pelayanan publik maupun pembangunan sosial.

Meskipun demikian, Kota Surabaya memiliki potensi yang cukup besar dalam memperkuat struktur birokrasi yang responsif gender. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai inovasi pelayanan publik, Surabaya memiliki peluang untuk mengembangkan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam implementasi PUG. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem data gender, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi.

Selain itu, dukungan kepemimpinan daerah juga berperan penting dalam memperkuat struktur birokrasi. Kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender dapat mendorong terciptanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi serta meningkatkan kepatuhan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan gender.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Efektivitas koordinasi antar lembaga, kejelasan pembagian tugas, keberadaan SOP, sistem monitoring dan evaluasi, serta dukungan kelembagaan menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan kolaboratif perlu terus dilakukan agar pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara optimal dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik

Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pengarusutamaan gender telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional maupun berbagai regulasi daerah yang mendukung integrasi perspektif gender dalam pembangunan. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, berdasarkan berbagai hasil studi literatur, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin tercapainya tujuan kebijakan secara substantif. Dalam banyak kasus, kebijakan PUG telah diterapkan secara administratif, tetapi implementasinya belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pengurangan ketimpangan gender di masyarakat.

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan dan menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini dapat dilihat dalam implementasi PUG di berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil kajian literatur, salah satu bentuk kesenjangan yang paling sering ditemukan adalah perbedaan antara komitmen normatif pemerintah dengan implementasi nyata di tingkat masyarakat. Secara formal, banyak institusi pemerintah telah menyatakan dukungan terhadap kesetaraan gender melalui program dan regulasi. Akan tetapi, dalam praktiknya isu gender sering kali belum menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan daerah.

Penelitian Fauziyah menjelaskan bahwa implementasi pengarusutamaan gender masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam konteks Kota Surabaya, kesenjangan antara kebijakan dan praktik dapat terlihat dari masih adanya ketimpangan gender di beberapa sektor sosial dan ekonomi meskipun kebijakan PUG telah diterapkan. Misalnya, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih menghadapi tantangan dalam akses ekonomi, perlindungan kerja, serta beban ganda dalam kehidupan domestik dan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengubah struktur sosial dan budaya yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Pengarusutamaan gender pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat.

Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan praktik juga dapat dilihat dari implementasi program yang masih bersifat formalitas. Dalam beberapa kasus, perangkat daerah telah memasukkan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan atau laporan kegiatan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pengarusutamaan gender lebih banyak dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan sebagai strategi pembangunan yang substantif.

Penelitian Wongkar, Liando, dan Kawung menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender belum berjalan optimal karena adanya hambatan komunikasi, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Hambatan tersebut menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Kesenjangan lainnya juga terlihat pada aspek pemahaman masyarakat mengenai gender. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai sosialisasi dan program edukasi, masih terdapat masyarakat yang memiliki pandangan patriarkis dan stereotip gender yang kuat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki memiliki posisi dominan dalam ruang publik, sedangkan perempuan lebih berperan di sektor domestik. Budaya patriarki tersebut menjadi hambatan sosial yang menyebabkan implementasi kebijakan kesetaraan gender tidak berjalan secara maksimal.

Dalam praktik di Surabaya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, akses terhadap kesempatan ekonomi, maupun keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kesenjangan implementasi tidak hanya berasal dari birokrasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat.

Selain faktor budaya, kesenjangan kebijakan dan praktik juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Tidak semua perangkat daerah memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup mengenai implementasi gender responsif. Akibatnya, program yang dilaksanakan seringkali belum berdasarkan analisis kebutuhan gender yang mendalam. Program pembangunan yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan

akhirnya dilaksanakan secara umum tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan pengalaman dan kebutuhan sosial.

Nurdin menjelaskan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan institusional dan struktural yang menyebabkan kebijakan belum terintegrasi secara optimal dalam pembangunan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan gender memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik juga dapat dilihat dari aspek monitoring dan evaluasi kebijakan. Evaluasi implementasi PUG sering kali masih berfokus pada aspek administratif, seperti jumlah program atau dokumen yang telah disusun, bukan pada perubahan kondisi masyarakat secara nyata. Padahal, tujuan utama pengarusutamaan gender adalah menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan gender dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, Kota Surabaya juga menunjukkan berbagai upaya positif dalam mendukung implementasi PUG, seperti pengembangan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelayanan publik inklusif, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Berbagai program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesetaraan gender. Namun, implementasi kebijakan tetap memerlukan penguatan agar tidak berhenti pada tingkat formalitas administratif saja.

Untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang lebih substantif. Selain itu, perubahan budaya masyarakat melalui pendidikan gender dan peningkatan kesadaran sosial juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi PUG.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya terjadi karena berbagai faktor, mulai dari komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung, struktur birokrasi yang belum terintegrasi, hingga faktor budaya patriarki dalam masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pengarusutamaan gender memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional agar tujuan kesetaraan gender dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan kebijakan kesetaraan gender melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pencapaian yang telah diraih Kota Surabaya, seperti tingginya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang diterima secara berulang. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Surabaya menjadi salah satu daerah yang dinilai cukup berhasil dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah. Berbagai program yang responsif gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, hambatan implementasi masih ditemukan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai kebijakan PUG masih belum merata sehingga masih terdapat masyarakat maupun pelaksana kebijakan yang belum memahami konsep kesetaraan gender secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi

kebijakan sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya diterapkan secara substantif dalam kehidupan masyarakat.

Pada aspek sumber daya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami perspektif gender juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi dan program pendukung, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, ketersediaan anggaran dan dukungan fasilitas juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender secara optimal.

Pada aspek disposisi, masih ditemukan adanya sikap pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya menjadikan isu gender sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender masih perlu diperkuat, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun telah terdapat lembaga dan focal point yang mendukung implementasi kebijakan gender, efektivitas koordinasi dan integrasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan komitmen pelaksana kebijakan, serta perbaikan koordinasi birokrasi agar implementasi pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang tidak hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan sehingga artikel ilmiah yang berjudul "Dari Kebijakan ke Praktik: Analisis Implementasi Pengarusutamaan Gender di Masyarakat Kota Surabaya" ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses penyusunan artikel ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami kajian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya terkait pengarusutamaan gender dan penerapan teori implementasi George Edward III dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik selama proses perkuliahan sehingga penulis memiliki dasar pemahaman yang cukup dalam menyusun penelitian ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bekal ilmu dan dukungan akademik yang telah diberikan.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai lembaga dan instansi pemerintah yang telah menyediakan dokumen, laporan, serta publikasi resmi yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen kebijakan yang digunakan sangat membantu penulis dalam memperoleh informasi dan memperkuat analisis mengenai implementasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada para peneliti dan akademisi yang karya ilmiahnya menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Berbagai penelitian terdahulu memberikan kontribusi besar dalam memperkaya perspektif dan memperdalam pembahasan terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, motivasi, dan semangat selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, serta semangat selama proses penulisan artikel ini berlangsung. Dukungan dalam bentuk diskusi, motivasi, maupun bantuan teknis sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai sumber referensi akademik maupun sebagai bahan kajian dalam pengembangan implementasi pengarusutamaan gender di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya.

REFERENSI

- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender*. (n.d.). *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 7(2). [Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Article](#)
- Belajar dari yang terbaik: Evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, Indonesia*. (n.d.). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1). [Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Article](#)
- Analisis kesetaraan gender di Kota Surabaya*. (n.d.). *Jurnal Registratie*, 7(2). [Jurnal Registratie Article](#)
- Implementasi kebijakan publik dalam pemerintahan daerah*. (2021). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. [Moderat Journal Article](#)
- Implementasi kebijakan publik*. (n.d.). *Jurnal Administrasi Publik*. [Jurnal Administrasi Publik Article](#)
- Pengarusutamaan gender dalam perspektif pembangunan sosial*. (n.d.). *Indonesian Journal of Government and Social Science*. [Indonesian Journal of Government and Social Science Article](#)
- Implementasi gender equality dalam kebijakan daerah*. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Global Education*. [Jurnal Ilmiah Global Education Article](#)
- Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. (n.d.). [Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Article](#)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Statistik gender tematik*. KemenPPPA.